

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar dunia tidak terlepas dari reformasi ekonomi melalui kebijakan *Open Door Diplomacy* yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Reformasi ini menandai perubahan besar Tiongkok, dari yang sebelumnya menggunakan sistem ekonomi tertutup, menjadi sistem ekonomi yang lebih terbuka dan berbasis pasar.¹ Sejak reformasi ini, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan rata-rata 9-10% per tahun.² Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat.³ Perubahan ekonomi yang signifikan ini, memberikan Tiongkok sumber daya yang cukup untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global melalui diplomasi ekonomi, investasi luar negeri, dan proyek pembangunan lintas negara.

Seiring dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok, Tiongkok juga menegaskan kembali posisi geopolitiknya di kawasan Asia dan dunia. Di masa kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan luar negeri Tiongkok berubah dari yang awalnya berorientasi domestik menjadi lebih ekspansif dan proaktif. Salah satu manifestasi dari kebijakan luar negeri yang baru ini adalah peluncuran kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk

¹ Jude Howell, "The Impact of the Open Door Policy on the Chinese State," *The Chinese State in the Era of Economic Reform: The Road to Crisis: Asia and the Pacific*, 1991, 119–46, <https://doi.org/10.4324/9781315488172-14>.

² Milka Mutiara, "Mengapa Ekonomi China Kuat?," *emiten news.com*, 2025, https://emitennews.com/news/mengapa-ekonomi-china-kuat#google_vignette.

³ International Monetary Fund, "World Economic Outlook: Global Economic Prospects," *International Monetary Fund*, no. January 2025 (2025): 3.

memperkuat konektivitas ekonomi dan infrastruktur lintas benua melalui dua jalur besar, yaitu *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*.⁴

Secara resmi, BRI merupakan sebuah strategi pembangunan bersama yang mengedepankan win-win cooperation. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan ini juga menjadi alat strategi bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya, terutama di tingkat global. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Sara Lengauer, menyebut bahwa kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok didorong oleh tiga motif utama, yaitu motif politik, ekonomi, dan ideologis.⁵ Pendekatan ini memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana proyek-proyek kerja sama pembangunan yang melibatkan Tiongkok dapat mencerminkan berbagai kepentingan yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri tersebut.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi dalam implementasi BRI. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara memiliki kedekatan geografis, potensi pasar yang besar, dan posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Asia Tenggara juga menjadi arena kompetisi bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok berupaya untuk memperluas jaringan konektivitas ekonominya melalui proyek infrastruktur, seperti China-Laos Railway di Laos, East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia, kereta cepat Bangkok-Nong Khai di Thailand, dan

⁴ Jonathan E. Hillman, "The Emperor's New Road," *The Emperor's New Road*, 2020, 113, <https://doi.org/10.2307/j.ctv15pjxqt>.

⁵ Sara Lengauer, "China's Foreign Aid Policy: Motive and Method" 9, no. 2 (2011): 35–81, <http://epublications.bond.edu.au/cm/vol9/iss2/3>.

jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam.⁶ Namun, setiap negara ini, memiliki respons yang berbeda dalam menerima BRI.

Dalam konteks Asia Tenggara, Vietnam menjadi kasus yang paling menarik untuk dikaji. Secara geografis, Vietnam berbatasan langsung dengan Tiongkok di bagian utara, menjadikan Vietnam sebagai mitra yang potensial bagi Tiongkok dalam jaringan konektivitas BRI melalui jalur darat ke Asia Tenggara. Namun secara historis, hubungan Tiongkok dan Vietnam memiliki dinamika yang kompleks. Meskipun kedua negara ini sama-sama menganut ideologi komunis, hubungan mereka sering kali mengalami ketegangan politik. Pada masa Perang Dingin, Vietnam cenderung lebih dekat kepada Uni Soviet daripada Tiongkok karena adanya perbedaan strategi revolusi dan perebutan pengaruh di kawasan.⁷ Hingga terjadi puncak ketegangan antara Vietnam dan Tiongkok pada perang perbatasan Vietnam-Tiongkok tahun 1979, yang membuat hubungan kedua negara ini semakin buruk. Namun, semenjak keduanya menormalisasi hubungan pada tahun 1991, Tiongkok dan Vietnam mulai menjalin kerja sama kembali terutama dalam kerja sama ekonomi.⁸

Meskipun memiliki kedekatan dalam ideologi komunis, kedua negara ini tetap memiliki sejarah perang dan sengketa wilayah. Tiongkok dan Vietnam pernah terlibat dalam perang pada tahun 1979 yang dipicu oleh invasi Vietnam ke Kamboja untuk menggulingkan rezim Khmer Merah yang didukung oleh

⁶ Dung Viet Trinh, "South East Asian Countries' Policies toward a Rising China: Lessons from Vietnam's Hedging Response to the Belt and Road Initiative," *South East Asia Research* 30, no. 2 (2022): 237–54, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2064762>.

⁷ Do Thanh Hai, "Vietnam and China: Ideological Bedfellows, Strange Dreamers," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 2 (2021): 162–82, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1932018>.

⁸ Thanh Hai.

Tiongkok yang bersamaan dengan penganiayaan etnis Tionghoa di Vietnam serta ketegangan perbatasan antara kedua negara.⁹ Selain itu, antara Tiongkok dan Vietnam masih memiliki konflik yang berkepanjangan di Laut China Selatan terutama dalam kasus reklamasi lahan besar-besaran yang dilakukan oleh Vietnam di Kepulauan Spratly yang merupakan wilayah sengketa antara Tiongkok, Vietnam, dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya.¹⁰ Terakhir, konflik yang memperlihatkan ketegangan antara kedua negara ini yaitu krisis anjungan minyak tahun 2014 di wilayah sengketa di Kepulauan Paracel.¹¹ Meskipun begitu, Vietnam menganggap bahwa Tiongkok merupakan mitra utama mereka dalam kerja sama ekonomi. Hal ini menunjukkan sikap Vietnam yang tetap berhati-hati dalam menerima Tiongkok atau disebut dengan strategi *hedging*.

Dalam konteks inilah, proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong menjadi sangat menarik untuk dibahas. Proyek ini merupakan proyek kereta perkotaan pertama di Vietnam yang sepenuhnya dibiayai oleh pinjaman luar negeri dari Tiongkok melalui China Exim Bank. Proyek ini awalnya berjumlah USD 552 juta, namun pada perkembangannya meningkat menjadi USD 868 juta karena lamanya proses pengerjaan.¹² Proyek trem ini dikerjakan oleh China Railway Sixth Group yang merupakan anak perusahaan dari China Railway Engineering Corporation. Dengan adanya proyek pembangunan jalur trem ini, menjadi simbol kerja sama yang strategis antara Tiongkok dan Vietnam. Jalur trem Cat Linh-Ha Dong

⁹ Miles Maochun Yu, "The 1979 Sino-Vietnamese War and Its Consequences," Hoover Institution, 2022, <https://www.hoover.org/research/1979-sino-vietnamese-war-and-its-consequences>.

¹⁰ Ian Storey, "The South China Sea in 2025: More of the Same, Possibly Worse," Fulcrum, 2025.

¹¹ Gregory B. Poling & Ernest Z. Bower, "China-Vietnam Tensions High over Drilling Rig in Disputed Waters," CSIS, 2014.

¹² Denada LGaol Faraswacyen and Y. Kurniawan, "Diplomasi Ekonomi Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) Di Asia Tenggara (2013-2018)," *Balcony: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 5, no. 1 (2021): 1–10.

membentang sepanjang 13 km dengan 12 stasiun dari Cat Linh yang terletak di Distrik Dong Da hingga ke Yen Nghia yang berada di Distrik Ha Dong, Hanoi.

Namun proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak kendala yang terjadi selama pengerjaan proyek ini, dimulai dari keterlambatan penyelesaian yang hampir satu dekade. Proyek yang awalnya dibentuk pada tahun 2011, namun selesai pada tahun 2021. Terjadinya pembengkakan biaya dan serangkaian kecelakaan konstruksi menimbulkan kritikan masyarakat Vietnam terhadap proyek ini.¹³ Akibatnya, banyak masyarakat Vietnam yang membandingkan proyek ini dengan proyek metro di Ho Chi Minh City yang dibiayai sepenuhnya oleh Jepang melalui skema Official Development Assistance (ODA). Hal ini makin menguatkan persepsi masyarakat Vietnam bahwa proyek yang dibangun oleh Jepang lebih profesional dan efisien. Adanya perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa proyek infrastruktur dari luar negeri di Vietnam menjadi sebuah arena kompetisi antara Tiongkok dan Vietnam dalam membangun pengaruhnya di Asia Tenggara.

Dalam berbagai kajian mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok, proyek infrastruktur di luar negeri sering dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas hubungan ekonomi dan politik dengan negara mitra. Keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong dapat dilihat sebagai bagian dari kerja sama pembangunan dan infrastruktur antara kedua negara. Melalui proyek infrastruktur, Tiongkok sering dipresentasikan sebagai mitra pembangunan yang menyediakan dukungan pembiayaan, teknologi, serta

¹³ Van Hoa Vu, Jenn Jaw Soong, and Khac Nghia Nguyen, "Vietnam's Perceptions and Strategies toward China's Belt and Road Initiative Expansion: Hedging with Resisting," *Chinese Economy* 54, no. 1 (2021): 56–68, <https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1809818>.

kapasitas konstruksi bagi negara-negara berkembang. Dalam perspektif foreign aid, proyek infrastruktur yang didukung oleh Tiongkok sering dianalisis sebagai bagian dari kebijakan bantuan pembangunan yang memiliki berbagai dimensi kepentingan. Menurut Sara Lengauer, bantuan luar negeri Tiongkok dapat dipengaruhi oleh beberapa motif utama, yaitu motif ekonomi, politik, dan ideologis. Motif ekonomi berkaitan dengan perluasan pasar serta peluang kontrak bagi perusahaan Tiongkok yang berada di luar negeri. Motif politik berkaitan dengan upaya Tiongkok untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral. Dan motif ideologis berkaitan dengan upaya Tiongkok untuk menampilkan diri sebagai model pembangunan¹⁴.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan Tiongkok dalam proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong juga dapat dipahami dalam berbagai perspektif. Dari sisi ekonomi, proyek pembangunan infrastruktur di luar negeri sering dikaitkan dengan peluang bagi perusahaan konstruksi Tiongkok untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan di negara lain dan upaya untuk menyalurkan kelebihan industri dalam negeri¹⁵. Dari sisi politik, kerja sama pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Tiongkok dan Vietnam di tengah dinamika hubungan di kawasan Laut China Selatan. Namun bagi Vietnam, proyek ini juga berkaitan dengan kebutuhan modernisasi transportasi perkotaan di Hanoi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyek trem Cat Linh-Ha Dong tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur,

¹⁴ Lengauer, "China's Foreign Aid Policy: Motive and Method."

¹⁵ Yiping Huang, "Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment," *China Economic Review* 40, no. 2016 (2016): 314–21, <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>.

tetapi juga berada dalam dinamika hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara¹⁶.

Jika dibandingkan dengan negara komunis lainnya, seperti Laos dan Kuba, implementasi BRI di negara komunis lainnya memiliki karakter yang berbeda. Seperti di Laos, proyek China-Laos Railway berjalan relatif lancar dan sering dipandang sebagai simbol keberhasilan kerja sama infrastruktur antara kedua negara. Sebaliknya, Vietnam cenderung bersikap hati-hati dalam menerima proyek yang berkaitan dengan BRI karena adanya sejarah konflik dan sengketa wilayah dengan Tiongkok. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga pertimbangan politik masing-masing negara.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami apa motif Tiongkok dalam memberikan bantuan pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam. Penelitian ini akan membahas bagaimana motif ekonomi, politik, dan ideologis Tiongkok dalam pembangunan jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam. Dengan menggunakan teori *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* oleh Sara Lengauer, penelitian ini akan menguraikan bagaimana motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam pembangunan jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, keterlibatan Tiongkok dalam proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji.

¹⁶ Trinh, "South East Asian Countries' Policies toward a Rising China: Lessons from Vietnam's Hedging Response to the Belt and Road Initiative."

Proyek ini merupakan salah satu bentuk kerja sama pembangunan infrastruktur antara Tiongkok dan Vietnam yang berkaitan dengan Belt and Road Initiative. Namun, dinamika hubungan kedua negara yang diwarnai oleh kerja sama ekonomi dan ketegangan politik di kawasan Laut China Selatan menjadikan proyek ini semakin kompleks. Selain itu, berbagai studi mengenai bantuan luar negeri Tiongkok menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai motif, baik itu motif ekonomi, politik, dan ideologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami motif apa yang melatarbelakangi Tiongkok dalam pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah “Apa saja motif yang melatarbelakangi keterlibatan Tiongkok dalam pemberian bantuan pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis motif Tiongkok dalam implementasi Belt and Road Initiative di Vietnam melalui proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian mengenai Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara. Melalui analisis proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam, penelitian ini memperkaya

literatur mengenai motif Tiongkok dan penerapan *China's foreign aid policy motives* dalam konteks pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang dinamika geopolitik regional, terutama bagaimana negara menengah seperti Vietnam mengelola interaksi dengan dua kekuatan besar di Asia Timur, yakni Tiongkok dan Jepang. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi selanjutnya yang membahas diplomasi ekonomi, geopolitik, dan strategi luar negeri negara-negara ASEAN.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam memahami motif Tiongkok melalui proyek-proyek infrastruktur BRI. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih hati-hati terhadap tawaran investasi Tiongkok, dengan menimbang peluang ekonomi sekaligus risiko geopolitik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat akademik, mahasiswa, maupun pengamat politik internasional untuk memahami bagaimana proyek transportasi perkotaan yang tampak sederhana, seperti jalur trem Cat Linh–Ha Dong, sesungguhnya memiliki dimensi strategis dalam hubungan bilateral Tiongkok dan Vietnam. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya memperkuat aspek teoritis, tetapi juga menawarkan pandangan praktis mengenai dinamika diplomasi ekonomi dan keamanan di kawasan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti bahas. Kumpulan beberapa literatur ilmiah ini, peneliti jadikan sebagai dasar untuk menemukan dan menganalisis anomali dalam penelitian. Adapun lima literatur yang peneliti jadikan sebagai referensi utama penelitian yaitu:

Pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul “*Understanding China’s Belt and Road Initiative : Motivation, Framework, and Assessment*” yang ditulis oleh Yiping Huang tahun 2016. Artikel jurnal ini menjelaskan secara komprehensif mengenai latar belakang, kerangka kerja, dan tujuan dari Belt and Road Initiative (BRI). Tulisan ini menegaskan bahwa BRI merupakan ambisi ekonomi internasional terbesar Tiongkok yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, dan Afrika melalui pembangunan infrastruktur, dialog kebijakan, perdagangan bebas, dukungan keuangan, dan pertukaran antar masyarakat. Artikel ini menyoroti dua motif utama BRI yaitu, upaya Tiongkok untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok di tengah perlambatan ekonomi, serta keinginan Tiongkok untuk memperluas pengaruh Tiongkok dalam tatanan ekonomi global.¹⁷ Tulisan ini juga menekankan bahwa infrastruktur menjadi pilar utama BRI karena dianggap mampu mendorong konektivitas regional dan pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan berkembang.¹⁸ Meskipun begitu, tulisan ini juga mengingatkan Tiongkok akan tantangan besar yang dihadapi dari BRI, seperti koordinasi lintas negara, risiko

¹⁷ Huang, “Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment.”

¹⁸ Huang.

politik, dan keberlanjutan finansial proyek-proyek lintas batas yang berpotensi menghambat aktivitas dari BRI.

Tulisan ini memberikan dasar teoritis yang penting untuk memahami proyek trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam sebagai salah satu manifestasi nyata dari implementasi BRI. Jika tulisan ini menyoroti BRI dari perspektif makro, maka penelitian ini lebih berfokus pada motif Tiongkok di proyek trem Cat Linh-Ha Dong. Berdasarkan analisis tulisan ini, proyek trem Cat Linh-Ha Dong dapat dipahami bukan hanya sebagai proyek transportasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan luar negeri Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya di Asia Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini mempersempit ruang analisis dari skala global menjadi studi kasus di Vietnam dengan fokus untuk mengidentifikasi motif Tiongkok dalam proyek trem Cat Linh-Ha Dong. Melalui artikel ini, penelitian yang akan peneliti lakukan akan memberikan penjelasan bagaimana proyek-proyek BRI digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan dan memperluas pengaruhnya di kawasan.

Rujukan kedua yang peneliti gunakan yaitu tulisan yang berjudul *“Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’ : Beyond ‘Grand Strategy’ to A State Transformation Analysis”* oleh Lee Jones dan Jinghan Zeng tahun 2019. Tulisan ini mengkritisi narasi dominan yang menggambarkan BRI sebagai strategi global Tiongkok yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. Menurut artikel ini, BRI sebenarnya lebih merupakan hasil dari kebijakan yang tidak terpusat, di mana berbagai aktor domestik di Tiongkok, seperti perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan bertindak secara oportunistik untuk

memperluas bisnis ke luar negeri.¹⁹ Artikel ini menegaskan bahwa banyak proyek BRI tidak dilandasi oleh grand strategy geopolitic, melainkan hanya kepentingan ekonomi jangka pendek, kurangnya koordinasi, dan kebutuhan finansial internal. Dalam beberapa kasus, artikel ini menyoroti bahwa proyek-proyek tersebut bahkan gagal mencapai tujuan awalnya karena buruknya manajemen, pembengkakan biaya, serta resistensi publik di negara penerima bantuan.

Perbedaan utama antara artikel ini dan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lingkup analisis dan titik fokusnya. Artikel ini bersifat konseptual dan berupaya mendekonstruksi mitos strategis BRI pada tataran global, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus konkret yang terjadi di Vietnam, khususnya proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong. Meskipun berbeda, artikel ini relevan untuk menjelaskan berbagai hambatan yang dihadapi proyek ini, seperti keterlambatan penyelesaian, masalah transparansi, dan resistensi publik Vietnam. Penelitian ini menggunakan pandangan kritis dari artikel ini untuk memahami bagaimana kompleksitas internal dan motif ekonomi politik Tiongkok tercermin dalam pelaksanaan proyek BRI di negara mitra.

Rujukan ketiga yaitu sebuah artikel jurnal yang berjudul “*China’s Belt and Road Initiative and Its Implications for Southeast Asia*” oleh Hong Yu tahun 2022. Jurnal ini menelaah bagaimana *Belt and Road Initiative* menjadi kebijakan strategis utama dalam politik luar negeri Tiongkok semenjak diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Menurut artikel ini, BRI bukan hanya sebagai proyek ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas lintas

¹⁹ Lee Jones and Jinghan Zeng, “Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’: Beyond ‘Grand Strategy’ to a State Transformation Analysis,” *Third World Quarterly* 40, no. 8 (2019): 1415–39, <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1559046>.

negara melalui infrastruktur darat dan laut, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas pengaruh politik dan ideologis Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini menjelaskan bahwa BRI memperlihatkan transformasi fundamental dalam orientasi diplomasi Tiongkok yang awalnya berfokus pada domestik menuju strategi proyeksi kekuatan eksternal yang lebih sistematis. Melalui BRI, Tiongkok memanfaatkan kombinasi antara diplomasi ekonomi dan development assistance untuk memperkuat posisi geopolitiknya dengan investasi besar-besaran di sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi.²⁰ Artikel ini menyoroti bagaimana proyek-proyek besar BRI, seperti jalur kereta cepat China-Laos Railway, proyek ECRL di Malaysia, dan jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam menjadi bukti nyata dari strategi Tiongkok untuk membangun jaringan infrastruktur yang menyatukan ekonomi regional dengan pasar Tiongkok. Namun, setiap negara-negara Asia Tenggara memiliki respon yang berbeda terhadap BRI ini. Negara seperti Kamboja dan Laos menyambut BRI sebagai peluang pembangunan, namun Vietnam dan Filipina menunjukkan sikap yang ambivalen karena kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi dan pengaruh politik Tiongkok. Artikel ini memberikan kerangka awal untuk memahami bahwa BRI adalah sebagai instrumen economic statecraft yang menggabungkan dimensi ekonomi dan politik secara bersamaan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan studi yang peneliti lakukan, terutama dalam menjelaskan konteks hubungan Tiongkok dengan Vietnam melalui proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong. Jika artikel ini menyoroti

²⁰ Hong Yu, "China's Belt and Road Initiative and Its Implications for South Asian Region," *National Bureau of Asian Research (NBR)* 2, no. 1 (2022): 117–22, <https://doi.org/10.24312/ucp-jhss.02.01.172>.

BRI dari perspektif makro yaitu sebagai strategi geopolitik yang mempengaruhi seluruh Asia Tenggara, maka penelitian ini mempersempit fokus ke tingkat mikro, yaitu untuk menganalisis bagaimana motif politik, ekonomi, dan ideologi Tiongkok bekerja di tingkat negara penerima. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong bukan hanya sekedar proyek infrastruktur perkotaan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran Tiongkok di Vietnam. Dengan mengacu pada artikel ini, bahwa negara-negara ASEAN menanggapi BRI dengan kehati-hatian karena mempertimbangkan politik dan sejarah Tiongkok, penelitian ini menempatkan kasus Vietnam sebagai contoh paling menarik dari hubungan kompleks antara solidaritas ideologi dan geopolitik. Oleh karena itu, artikel ini digunakan sebagai acuan untuk menelusuri bagaimana kebijakan foreign aid Tiongkok dimaknai di negara dengan sejarah hubungan yang sensitif seperti Vietnam.

Rujukan keempat yang peneliti gunakan adalah buku yang berjudul *Understanding China's Belt and Road Initiative* karya Hong Yu tahun 2024. Buku ini menelusuri evolusi Belt and Road Initiative dari fase awalnya yang fokus pada pembangunan infrastruktur menuju fase baru yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan diplomasi global. Buku ini menyebut perkembangan BRI ini sebagai BRI 2.0, yaitu transformasi dari proyek ekonomi berskala besar menuju platform geopolitik yang lebih kompleks.²¹ Buku ini menjelaskan bahwa setelah satu dekade dari pelaksanaan BRI, Tiongkok tidak hanya mengutamakan konektivitas fisik, tetapi juga memperluas agenda BRI ke bidang teknologi, energi hijau, kesehatan, dan digitalisasi yang disebut sebagai Digital Silk Road dan

²¹ Hong Yu, *Asia in Transition 26 Understanding China's Belt and Road Initiative*, vol. 26, 2024, <http://ias.ubd.edu.bn/>.

Health Silk Road. Dalam bab awal buku ini, memberikan pemahaman mengenai akar ideologis dan politik dari BRI tidak hanya dilihat sebagai proyek ekonomi global, tetapi juga sebagai instrumen kebangkitan Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. BRI hadir untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok dalam mengatasi kelebihan kapasitas industri domestik, memperluas pasar baru ke luar negeri, serta memperkuat peran internasional mata uang Tiongkok sebagai bagian dari motif ekonomi kebijakan luar negeri. Di sisi lain, buku ini menegaskan bahwa dimensi politik dan strategis BRI berfungsi sebagai sarana memperluas pengaruh Tiongkok di kawasan, terutama melalui diplomasi infrastruktur dan mekanisme soft power.

Buku ini berfokus pada sudut pandang Vietnam dalam melihat peluang dan risiko BRI, sementara dalam penelitian ini menekankan pada kepentingan strategis Tiongkok di balik bantuan pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong. Artikel ini menjelaskan bagaimana Vietnam menafsirkan dan merespons BRI, sedangkan penelitian ini lebih ke menganalisis motif politik, ekonomi, dan ideologi Tiongkok yang mendorong keterlibatan mereka dalam proyek infrastruktur perkotaan di Kota Hanoi. Artikel ini penting, karena memperlihatkan bagaimana Vietnam tetap selektif dan berhati-hati meskipun membutuhkan investasi, sedangkan dalam penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan proyek ini sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan soft power. Dengan membandingkan artikel ini, dapat memperlihatkan dinamika dua

arah yaitu kepentingan strategis Tiongkok serta strategi hedging yang digunakan oleh Vietnam dalam menghadapi pengaruh Tiongkok²².

Rujukan kelima yang peneliti gunakan yaitu “*South East Asian Countries Policies Toward a Rising China: Lesson from Vietnam’s Hedging Response to the BRI*” oleh Dung Viet Trinh tahun 2022. Artikel ini membahas bagaimana negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Vietnam merespons bagaimana China’s Rising melalui Belt and Road Initiative (BRI). Artikel ini menekankan bahwa Vietnam dipandang sebagai kasus yang unik karena posisinya sebagai negara tetangga langsung Tiongkok dengan sejarah konflik panjang, tetapi juga memiliki kebutuhan besar terhadap pembangunan infrastruktur. Vietnam merespons kebangkitan Tiongkok dengan strategi hedging, yakni menerima sebagian peluang ekonomi dari BRI, namun tetap membatasi keterlibatan politik dan strategis yang dapat mengancam kedaulatan nasional. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks BRI, Vietnam mengadopsi pendekatan selektif yaitu memanfaatkan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung modernisasi nasional, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kemitraan strategis dengan aktor lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India sebagai bentuk balancing. Penelitian ini juga menekankan bahwa kebijakan hedging Vietnam mencerminkan pola umum negara-negara Asia Tenggara dalam mengelola hubungan dengan Tiongkok yaitu menghindari konfrontasi langsung, tetapi juga tidak ingin jatuh dalam dominasi Tiongkok²³.

²² Long Duc Bao Nguyen et al., “The Belt and Road Initiative (BRI): Opportunities and Risks from Vietnamese Perspective,” *Journal of Asian Finance* 9, no. 4 (2022): 229–38, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0229>.

²³ Trinh, “South East Asian Countries’ Policies toward a Rising China: Lessons from Vietnam’s Hedging Response to the Belt and Road Initiative.”

Artikel ini menitikberatkan pada pola kebijakan hedging Vietnam terhadap Tiongkok dalam kerangka besar kebangkitan Tiongkok di Asia Tenggara, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada studi kasus spesifik proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong sebagai bagian dari BRI. Perbedaan utama dari artikel dan penelitian ini adalah fokus analisis, di mana artikel ini melihat Vietnam sebagai representasi negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang ekonomi dan menjaga kedaulatan politik. Sementara dalam penelitian ini ingin menjelaskan kepentingan strategis Tiongkok dalam memberikan bantuan infrastruktur tersebut. Namun, artikel ini dapat melengkapi penelitian ini yaitu dengan membantu menegaskan bahwa strategi hedging yang digunakan oleh Vietnam adalah pola konsisten dalam kebijakan luar negerinya, sedangkan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi Tiongkok digunakan dalam proyek trem ini.

1.7 Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian yang berjudul "Motif Tiongkok Dalam Proyek Jalur Trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam," peneliti menggunakan teori *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* dari Sara Lengauer untuk menjelaskan motif-motif bantuan luar negeri Tiongkok.

1.7.1 Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok

Dalam studi hubungan internasional, motif dapat diartikan sebagai dorongan atau alasan mendasar yang mempengaruhi perilaku suatu negara dalam sistem global. Motif menjadi dasar dari setiap tindakan diplomatik dan kebijakan luar negeri karena mencerminkan kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara. Dalam konteks kebijakan luar negeri, motif menjelaskan alasan suatu

negara mengambil tindakan tertentu, baik itu dalam bentuk kerja sama ekonomi, bantuan luar negeri, maupun intervensi politik. Oleh karena itu, untuk memahami motif seseorang harus memahami bagaimana negara menggunakan instrumen kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan, memperluas, atau melindungi posisinya di tatanan internasional²⁴.

Motif memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara bantuan luar negeri dan politik global. Bantuan luar negeri secara umum merupakan transfer sumber daya, baik itu dalam bentuk dana, teknologi, ataupun keahlian dari negara donor ke negara penerima dengan tujuan pembangunan, kemanusiaan, atau diplomasi²⁵. Namun dalam praktiknya, bantuan luar negeri tidak sesuai dengan tujuannya. Bantuan luar negeri sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan strategis, membangun citra positif, atau memperkuat hubungan bilateral. Dengan kata lain, bantuan luar negeri bukan hanya kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk memperoleh dukungan, pengaruh, dan keuntungan ekonomi.²⁶

Dalam kerangka hubungan internasional, bantuan luar negeri berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan luar negeri. Negara menggunakan bantuan luar negeri untuk mencapai tujuan politik eksternal, seperti memperkuat aliansi, menyeimbangkan kekuatan, atau mengamankan kepentingan

²⁴ Hans Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid," *American Political Science Review* 56, no. 2 (1962): 301–9.

²⁵ R. D. McKinlay and R. Little, "A Foreign Policy Model of U.S. Bilateral Aid Allocation," *World Politics* 30, no. 1 (1977): 58–86, <https://doi.org/10.2307/2010075>.

²⁶ Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, University of Chicago Press, vol. 1, 2007, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf <https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.

ekonomi. Menurut Clair Apodaca, dalam bukunya yang berjudul *Foreign Aid as Foreign Policy*, pemberian bantuan luar negeri mencerminkan kebijakan luar negeri itu sendiri karena mengandung dimensi politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang berlapis. Apodaca juga menjelaskan bahwa bantuan luar negeri dapat dilihat sebagai ekspresi nilai, kepentingan, dan strategi dari negara donor dengan motif yang bisa bersifat idealistik seperti kemanusiaan ataupun realistik seperti pengaruh politik. Oleh karena itu, bantuan luar negeri dalam konteks hubungan internasional menjadi salah satu alat yang menghubungkan antara kepentingan domestik dan tujuan global negara.

Dari perspektif teoritis, para pemikir realis dan ekonomi politik internasional menilai bantuan luar negeri sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*). Tokoh realis klasik seperti Morgenthau berpendapat bahwa bantuan luar negeri adalah bagian dari upaya negara untuk memperluas pengaruh dan mengamankan kepentingan nasionalnya.²⁷ Sementara itu, Keohane dan Nye menekankan bahwa kebijakan bantuan luar negeri juga mencerminkan interdependensi antara ekonomi domestik dan politik global.²⁸ Dengan demikian, analisis terhadap motif bantuan luar negeri dapat membantu menjelaskan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik domestik diterjemahkan menjadi strategi luar negeri di tingkat internasional. Bantuan luar negeri bukan hanya sekedar bentuk solidaritas, tetapi cerminan dari strategi global negara donor.

Dalam konteks Tiongkok, kebijakan bantuan luar negeri memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Sara Lengauer, terdapat tiga motif utama dalam

²⁷ Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid."

²⁸ Robert J Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence*, Grupo Editor Latinoamericano, 2012.

kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok, yaitu motif politik, motif ekonomi, dan motif ideologi. Motif politik terlihat dari upaya Tiongkok dalam memperluas pengaruh global dan memperoleh dukungan diplomatik dari negara-negara berkembang, melalui program South-South Cooperation. Motif ekonomi tercermin dari dorongan Tiongkok untuk membuka pasar baru, mengamankan akses terhadap sumber daya alam, dan menyalurkan kapasitas industri dalam negeri melalui proyek infrastruktur lintas negara. Motif ideologis muncul dari ambisi Tiongkok untuk mempromosikan model pembangunan alternatif yang menekankan prinsip non-interference dan mutual benefit. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat yang memiliki banyak syarat. Ketiga motif ini berjalan serentak dalam kebijakan luar negeri Tiongkok dan menjadi dasar dalam memahami strategi bantuan luar negeri, termasuk Belt and Road Initiative. Berikut penjelasan mengenai tiga motif bantuan luar negeri yang dilakukan Tiongkok menurut Sara Lengauer:²⁹

1. Motif Ekonomi

Motif ekonomi merupakan salah satu pendorong paling dominan dalam kebijakan bantuan luar negeri di era modern. Dalam konteks hubungan internasional, motif ini menjelaskan bagaimana suatu negara menggunakan instrumen ekonomi, seperti investasi dan bantuan pembangunan untuk memperkuat posisi dan kepentingan nasionalnya. Bantuan luar negeri yang didorong oleh motif ekonomi tidak semata bertujuan altruistik, tetapi berfungsi sebagai strategi untuk mengamankan akses terhadap sumber daya alam, memperluas pasar bagi produk domestik, serta mendukung ekspansi perusahaan

²⁹ Lengauer, "China's Foreign Aid Policy: Motive and Method."

nasional ke luar negeri. Bagi Tiongkok, motif ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi kebijakan luar negerinya, terutama setelah reformasi ekonomi tahun 1978. Pembangunan ekonomi yang pesat membuat Tiongkok memiliki kelebihan kapasitas industri dan kebutuhan energi yang besar, sehingga perluasan ekonomi ke luar negeri menjadi keharusan strategis. Melalui bantuan pembangunan dan inisiatif seperti Belt and Road Initiative, Tiongkok dapat memperkuat konektivitas globalnya dan juga menciptakan saluran ekonomi baru untuk menjaga stabilitas pertumbuhan domestik.

Secara historis, motif ekonomi dalam bantuan luar negeri mulai berkembang sejak pasca perang dunia II, ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat menggunakan bantuan ekonomi sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Program Marshall Plan yang dimulai pada tahun 1948 menjadi tonggak awal di mana bantuan luar negeri digunakan bukan hanya untuk pemulihan pascaperang, tetapi juga untuk membentuk pasar baru dan menahan ekspansi ideologi komunis di Eropa Barat. Sejak saat itu, motif ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan luar negeri modern. Dalam konteks Asia, Tiongkok mulai mengadopsi pendekatan serupa setelah reformasi Deng Xiaoping yang menekankan keterbukaan ekonomi. Bantuan luar negeri digunakan untuk memperkuat hubungan dagang, memperluas akses pasar, dan menyalurkan kelebihan kapasitas produksi domestik. Menurut Sara Lengauer, motif ekonomi Tiongkok dalam bantuan luar negeri, tidak hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi global yang mendukung kepentingan jangka panjang Tiongkok. Hal ini terlihat dari kebijakan *going out strategy* pada awal 2000-an yang

mendorong perusahaan milik negara Tiongkok (SOEs) berinvestasi secara agresif di luar negeri.

Menurut Sara Lengauer, indikator pertama dari motif ekonomi Tiongkok dalam kebijakan bantuan luar negerinya yaitu upaya membuka pasar baru dan mendukung ekspor domestik. Dengan memberikan pinjaman luar negeri, proyek infrastruktur dan kerja sama ekonomi, Tiongkok menciptakan permintaan bagi produk dan jasa dari dalam negeri. Banyak proyek bantuan Tiongkok yang mewajibkan negara penerima menggunakan bahan baku, tenaga kerja, atau kontraktor dari Tiongkok. Hal ini menyebabkan aliran dana bantuan kembali ke ekonomi domestik Tiongkok dalam bentuk kontrak dan ekspor, sehingga efek ekonominya bersifat sirkular. Sara juga menegaskan bahwa melalui skema seperti China Exim Bank dan China Development Bank, Tiongkok dapat menyalurkan pinjaman berbasis proyek yang mendukung ekspansi perusahaan infrastruktur dan energi milik negara. Dengan begitu, bantuan luar negeri berfungsi sebagai katalis bagi ekspansi ekonomi Tiongkok di pasar negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara diplomasi ekonomi dan kepentingan industri nasional.

Indikator yang kedua dari motif ekonomi dalam kebijakan luar negeri Tiongkok adalah upaya mengamankan sumber daya alam dan jalur perdagangan internasional. Pertumbuhan industri yang pesat dapat menyebabkan Tiongkok bergantung pada pasokan energi dan bahan mentah dari luar negeri. Melalui bantuan pembangunan dan investasi, Tiongkok berusaha memastikan kestabilan pasokan sumber daya seperti minyak, batu bara, dan mineral penting lainnya di negara-negara mitra. Sara menjelaskan bahwa banyak proyek bantuan dari

Tiongkok diarahkan ke sektor energi dan infrastruktur yang memiliki nilai strategis tinggi, seperti pembangunan pelabuhan, jalur kereta, dan pipa gas. Dengan membangun infrastruktur ini, Tiongkok tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi bilateral, tetapi juga menciptakan jaringan logistik yang menopang kepentingan perdagangan globalnya. Dalam konteks BRI, jalur darat melalui Asia Tengah dan jalur laut melalui Asia Tenggara secara langsung mendukung strategi energy security dan market diversification Tiongkok. Oleh karena itu, motif ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ambisi geopolitik, karena keduanya saling menopang dalam membentuk kebijakan luar negeri Tiongkok yang terintegrasi.

Berdasarkan dua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif ekonomi dalam kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok bersifat multidimensi, di mana menggabungkan kepentingan industri domestik, ekspansi perdagangan, dan keamanan energi dalam satu kerangka besar diplomasi ekonomi. Bantuan luar negeri bukan sekedar bentuk kerja sama pembangunan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan geopolitik Tiongkok di dunia internasional. Motif ekonomi ini menjadi fondasi bagi inisiatif seperti Belt and Road Initiative, di mana Tiongkok menggunakan proyek infrastruktur lintas negara untuk menciptakan keterhubungan ekonomi yang saling bergantung dengan negara mitra.

2. Motif Politik

Motif politik merupakan dimensi penting dalam analisis kebijakan luar negeri karena keterhubungan langsung dengan upaya negara untuk memperkuat

posisi dan pengaruhnya dalam sistem internasional. Dalam konteks bantuan luar negeri, motif politik menjelaskan bagaimana negara donor menggunakan bantuan sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis, seperti memperoleh dukungan diplomatik, memperluas pengaruh, dan menjaga stabilitas kawasan. Bantuan luar negeri menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk membentuk tatanan politik sesuai kepentingan nasional. Bagi Tiongkok, motif politik memiliki peran yang signifikan dalam strategi globalnya, terutama untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan besar yang mampu bersaing dengan negara barat. Dengan menyalurkan bantuan ke negara-negara berkembang, Tiongkok berupaya membangun citra positif sebagai mitra pembangunan yang setara dan non-intervensif, sekaligus menegaskan perannya sebagai pemimpin dunia global selatan.

Secara historis, penggunaan bantuan luar negeri sebagai instrumen politik sudah terlihat sejak masa perang dingin, ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan bantuan ekonomi untuk menarik aliansi ideologis. Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan untuk memperkuat pengaruh di Eropa Barat, sementara Uni Soviet menyalurkan bantuan kepada negara-negara sosialis di Eropa Timur, dan Asia. Tiongkok sebagai negara sosialis yang baru berdiri pada tahun 1949, mengadopsi strategi serupa dengan memberikan bantuan kepada negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika sebagai bentuk solidaritas anti-imperialis. Namun setelah reformasi ekonomi 1978, tujuan politik dalam bantuan luar negeri Tiongkok semakin berkembang. Menurut Sara, bantuan luar negeri digunakan sebagai sarana untuk memperluas *sphere of influence* Tiongkok, terutama di kawasan yang memiliki kepentingan

strategis seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri tidak hanya menjadi simbol solidaritas ideologis, tetapi juga bagian dari strategi politik global untuk memperkuat legitimasi Tiongkok di dunia internasional.

Indikator pertama dari motif politik Tiongkok dalam kebijakan bantuan luar negeri adalah upaya memperoleh dukungan diplomatik dan legitimasi internasional. Sejak era Mao Zedong, Tiongkok telah menggunakan bantuan luar negeri untuk membangun dukungan dari negara-negara berkembang, terutama dalam isu representasi politik di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sara menegaskan bahwa bantuan yang diberikan Tiongkok sering kali diarahkan kepada negara-negara yang secara politik penting dalam mendukung kepentingan Tiongkok, seperti kebijakan “One China Policy” dan penolakan terhadap Taiwan di arena diplomatik. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Tiongkok di UN, tetapi juga meningkatkan pengaruhnya di berbagai organisasi internasional dan forum regional. Dalam konteks Belt and Road Initiative, dukungan diplomatik dari negara-negara penerima bantuan juga menjadi modal politik penting bagi Tiongkok untuk menampilkan diri sebagai kekuatan global yang sah dan diterima secara luas oleh komunitas internasional.

Indikator kedua dari motif politik Tiongkok adalah usaha membangun pengaruh strategis dan stabilitas kawasan. Dengan menyalurkan bantuan ke negara-negara yang secara geografis dan politik penting, Tiongkok berupaya memperkuat kehadirannya di wilayah yang memiliki nilai strategis bagi keamanan dan ekonomi nasionalnya. Sara menyebutkan bahwa banyak proyek bantuan luar negeri Tiongkok terletak di negara-negara yang berada di jalur perdagangan

utama atau wilayah yang dianggap sensitif terhadap pengaruh negara-negara barat, seperti Asia Tenggara, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Melalui pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan jaringan transportasi, Tiongkok tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan bentuk soft control atas wilayah tersebut. Proyek-proyek ini memungkinkan Tiongkok untuk meningkatkan stabilitas regional sesuai kepentingannya, sekaligus mempersempit ruang pengaruh bagi kekuatan besar lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, bantuan luar negeri berfungsi sebagai bagian dari strategi politik jangka panjang Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan global dan memperkuat otonomi politiknya di arena internasional.

Dari kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif politik dalam kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok berfungsi untuk memperluas pengaruh diplomatik, memperoleh legitimasi internasional, dan menjaga stabilitas kawasan yang strategis. Bantuan luar negeri tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen politik untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih menguntungkan bagi Tiongkok. Dalam konteks modern, motif politik ini terwujud melalui proyek-proyek besar di bawah Belt and Road Initiative yang menghubungkan kepentingan diplomatik, ekonomi, dan geopolitik dalam satu kerangka kebijakan luar negeri yang terintegrasi.

3. Motif Ideologis

Motif ideologis merupakan dimensi yang sering kali diabaikan dalam analisis kebijakan bantuan luar negeri, padahal motif ini memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana suatu negara menyalurkan nilai, sistem politik,

serta model pembangunan ke negara lain. Dalam konteks hubungan internasional, motif ideologis mencerminkan upaya negara donor untuk memperluas pengaruh ideologi atau pandangan dunia tertentu, baik secara langsung ataupun melalui simbol-simbol politik dan budaya. Menurut Sara, motif ideologis Tiongkok dalam kebijakan bantuan luar negerinya tidak semata-mata didasarkan pada ekspor ideologi komunis, melainkan pada penyebaran nilai-nilai pembangunan khas Tiongkok seperti prinsip mutual respect, non-interference, dan win-win cooperation. Dengan demikian, motif ideologis Tiongkok lebih bersifat normatif dan kultural, yakni berusaha menunjukkan alternatif terhadap model pembangunan negara barat yang sering dikaitkan dengan syarat politik dan liberalisasi ekonomi.

Secara historis, akar motif ideologis Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Pada masa Mao Zedong, bantuan luar negeri digunakan sebagai alat solidaritas antarsesama negara sosialis dan gerakan anti-imperialis di Asia dan Afrika. Tiongkok pada masa itu menampilkan diri sebagai pelopor dunia ketiga, yang berupaya mendukung kemerdekaan politik dan ekonomi negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme. Namun setelah era reformasi ekonomi tahun 1978, pendekatan ideologis Tiongkok mengalami transformasi signifikan. Ideologi sosialisme yang dulu berorientasi pada revolusi kelas kini bergeser menjadi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang menekankan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan nasionalisme pragmatis. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri Tiongkok menjadi sarana untuk memperkenalkan model pembangunan yang dianggap berhasil, yaitu kombinasi antara ekonomi pasar dan kontrol politik yang

kuat sebagai alternatif bagi negara berkembang yang skeptis terhadap model liberal barat.

Indikator pertama dari motif ideologis menurut Sara yaitu upaya Tiongkok untuk menampilkan diri sebagai model pembangunan alternatif bagi negara berkembang. Melalui bantuan luar negeri dan proyek-proyek infrastruktur, Tiongkok berusaha mengeksport Model Beijing, yaitu sistem ekonomi yang menekankan pertumbuhan tanpa liberalisasi politik. Model ini dianggap menarik bagi banyak negara berkembang karena memberikan jalan bagi kemajuan ekonomi tanpa harus tunduk pada tuntutan reformasi politik seperti yang disyaratkan lembaga-lembaga Barat seperti IMF atau World Bank. Dalam hal ini, Tiongkok menggunakan proyek-proyek bantuan dan investasi sebagai bukti empiris bahwa pembangunan dapat dicapai melalui stabilitas politik dan intervensi negara yang kuat. BRI menjadi instrumen ideologis utama dalam menampilkan keberhasilan tersebut, sekaligus memperkuat narasi bahwa Tiongkok adalah mitra pembangunan yang menghormati kedaulatan nasional dan tidak melakukan intervensi terhadap urusan domestik negara lain.

Indikator kedua dari motif ideologis adalah peneguhan citra Tiongkok sebagai kekuatan dunia non-hegemonik yang menolak dominasi negara-negara Barat. Dalam berbagai forum internasional, seperti Forum on China Africa Cooperation (FOCAC) dan Belt and Road Forum (BRF), Tiongkok selalu menekankan prinsip kesetaraan, solidaritas negara Selatan-Selatan, dan anti-hegemonisme. Nilai-nilai ini membentuk basis ideologis dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang ingin menciptakan tatanan dunia multipolar, di mana kekuatan tidak hanya didominasi oleh Barat. Sara menjelaskan bahwa bantuan

luar negeri Tiongkok merupakan ekspresi dari ideologi pembangunan yang berakar pada pengalaman sejarahnya sendiri, yakni perjuangan melawan kolonialisme dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, Tiongkok memosisikan dirinya bukan sebagai donor dalam arti tradisional, tetapi sebagai mitra pembangunan yang memiliki kesetaraan moral dengan negara penerima bantuan. Citra ini diperkuat melalui diplomasi publik dan retorika politik yang konsisten menolak istilah *conditional aid* dan menggantikannya dengan *mutual benefit cooperation*.

Dari kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif ideologis Tiongkok dalam kebijakan bantuan luar negeri bukan bertujuan untuk mengekspor ideologi komunis secara eksplisit, tetapi untuk mempromosikan model pembangunan dan nilai-nilai politik khas Tiongkok sebagai alternatif dari sistem Barat. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri menjadi sarana untuk menampilkan China Model, yakni perpaduan antara ekonomi pasar, stabilitas politik, dan kontrol negara yang kuat sebagai paradigma baru pembangunan global. Dengan demikian, motif ideologis berfungsi untuk memperluas soft power Tiongkok, meningkatkan daya tarik globalnya, serta memperkuat legitimasi politik domestik dan internasional.

1.8 Metode Penelitian

Istilah *methodology* berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *methodos* yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian rasional. Secara konseptual, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang cara atau langkah-langkah sistematis dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, metodologi memiliki cakupan yang lebih

luas dibandingkan dengan metode, karena tidak hanya membahas teknik-teknik pengumpulan atau analisis data, tetapi juga mencakup kerangka filosofis, paradigma berpikir, serta logika ilmiah yang melandasi suatu penelitian. Sementara metode lebih berfokus pada alat atau prosedur praktis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, metodologi berbicara mengapa dan bagaimana metode tertentu digunakan berdasarkan pendekatan ilmiah yang dipilih. Dalam konteks penelitian hubungan internasional, metodologi berperan penting untuk menjelaskan secara sistematis mengapa dan bagaimana suatu fenomena antarnegara dapat dipelajari secara ilmiah. Melalui metodologi, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi peristiwa, tetapi juga berusaha memahami makna, motif, serta dinamika yang mendasari perilaku aktor dalam sistem internasional. Dengan demikian, metodologi penelitian berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik analisis kebijakan luar negeri, yang memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena global secara objektif namun tetap mempertimbangkan konteks, historis, politik, dan sosial yang melingkupinya.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran makna, konteks, dan dinamika sosial politik yang melatarbelakanginya. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi secara komprehensif suatu proses, tindakan, atau kebijakan, berdasarkan perspektif aktor-aktor yang terlibat³⁰. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, tetapi pada upaya memahami realitas sosial melalui interpretasi terhadap

³⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks: Sage Publications, 2009.

data kualitatif seperti dokumen, wawancara, pernyataan resmi, media, serta sumber tertulis lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap hubungan kompleks antara faktor ekonomi, politik, dan ideologi yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri suatu negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena secara rinci dan kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan makna dan hubungan antarvariabel. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis bukan hanya mendeskripsikan peristiwa atau kebijakan, tetapi juga menjelaskan motif dan rasionalitas di balik tindakan tersebut³¹. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis motif Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri melalui proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam sebagai bagian dari implementasi Belt and Road Initiative. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat menelusuri secara mendalam bagaimana faktor ekonomi, politik, dan ideologis berinteraksi dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam konteks hubungan bilateral Tiongkok-Vietnam.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini ditetapkan agar analisis yang dilakukan tetap terarah dan tidak melebar dari pokok pembahasan utama. Penelitian ini secara khusus membahas motif Tiongkok dalam memberikan bantuan pembangunan proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Hanoi sebagai bagian dari implementasi Belt and

³¹ Yanyi K. Djamba and W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Teaching Sociology*, vol. 30, 2002, <https://doi.org/10.2307/3211488>.

Road Initiative. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori dari Sara Lengauer mengenai *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* yang mencakup tiga aspek utama, yaitu motif ekonomi, motif politik, dan motif ideologis. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada periode 2011 hingga 2021, yaitu semenjak proyek dimulai hingga diresmikan dan beroperasi penuh, sehingga penelitian tidak mencakup perkembangan pasca operasional atau proyek BRI lainnya di Vietnam. Pemilihan rentang waktu ini juga mempertimbangkan lamanya proses pembangunan yang mencapai satu dekade. Adapun penundaan proyek ini dikarenakan beberapa faktor seperti kendala teknis dalam konstruksi, perbedaan standar keselamatan antara Tiongkok dan Vietnam, serta dinamika geopolitik dan diplomatik antara Tiongkok dan Vietnam, terutama dalam kasus Laut China Selatan yang sempat menimbulkan ketegangan bilateral. Fokus penelitian diarahkan pada motif dan kepentingan Tiongkok, bukan pada evaluasi kuantitatif terhadap dampak ekonomi proyek bagi Vietnam. Penelitian ini juga tidak membahas seluruh proyek BRI di Asia Tenggara, tetapi menjadikan proyek Cat Linh-Ha Dong sebagai studi kasus utama, dengan perbandingan singkat terhadap proyek BRI di negara komunis lainnya, seperti Laos untuk memperkaya konteks analisis. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan terarah mengenai bagaimana proyek Cat Linh Ha-Dong merefleksikan motif bantuan luar negeri Tiongkok tanpa melebar ke isu-isu di luar cakupan utama pembahasan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood, unit analisis merupakan objek atau entitas yang perilakunya menjadi fokus utama dalam penelitian. Unit ini menggambarkan

apa yang hendak dijelaskan oleh peneliti, baik dalam bentuk deskripsi maupun penafsiran terhadap hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam fenomena yang diteliti³². Unit analisis dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) yang menjadi hasil dari pengaruh faktor lain³³. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah bantuan luar negeri Tiongkok, khususnya sebagaimana diwujudkan dalam kerangka Belt and Road Initiative. Bantuan luar negeri dipilih karena berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan oleh Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya secara global. Melalui BRI, Tiongkok tidak hanya memberikan bantuan finansial atau teknis, tetapi juga membangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang mencerminkan kepentingan strategisnya, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan secara khusus di Vietnam.

Adapun yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan jalur trem Cat Linh Ha-Dong di Hanoi, Vietnam. Proyek ini dipandang signifikan karena merupakan proyek transportasi perkotaan pertama di Vietnam yang sepenuhnya dibiayai oleh Tiongkok melalui skema BRI, sekaligus mengandung dimensi politik, ekonomi, dan ideologis yang kompleks. Proyek tersebut menjadi faktor utama (independent variable) yang menjelaskan bagaimana bentuk konkret bantuan luar negeri Tiongkok dijalankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan serta persepsi negara mitra. Dengan demikian, proyek ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami bagaimana kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan. Sementara itu, tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

³² Mohtar Mas' oed, "ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin Dan Metodologi," *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 1990.

³³ Mas' oed.

berada pada tingkat negara (state level analysis), karena penelitian ini menyoroti interaksi antarnegara, yaitu antara Tiongkok sebagai pemberi bantuan dan Vietnam sebagai penerima, dalam konteks hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri masing-masing.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber utama yaitu, data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dikaji. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber resmi tanpa melalui proses olahan oleh pihak lain, sehingga bersifat lebih autentik dan orisinal³⁴. Sementara itu, data sekunder adalah data yang telah melalui proses pengolahan, analisis, atau publikasi oleh peneliti dan lembaga sebelumnya. Pemisahan antara kedua jenis data ini menjadi penting agar penelitian mampu menjaga keabsahan, validitas, dan kejelasan informasi yang digunakan dalam menganalisis motif Tiongkok dalam proyek jalur trem Cat Linh-Ha Dong sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen kebijakan resmi, laporan pemerintah, serta pernyataan publik pejabat terkait dengan pelaksanaan BRI dan proyek Cat Linh Ha-Dong. Peneliti mengakses sumber-sumber resmi seperti *State Council of the People's Republic of China* (english.www.gov.cn), *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China* (mfa.gov.cn), serta Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Transportasi Vietnam. Dokumen-dokumen tersebut mencakup pidato, siaran pers, dan pernyataan

³⁴ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier" 5, no. September (2024): 110–16.

kebijakan yang memberikan gambaran mengenai bagaimana Tiongkok membingkai proyek ini sebagai bagian dari strategi BRI dan bagaimana Vietnam meresponsnya secara diplomatik.

Selain dokumen kebijakan, data primer juga mencakup laporan proyek dan kontrak pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Vietnam dan Tiongkok, seperti dokumen dari Hanoi Metropolitan Railway Management Board (MRB) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Laporan tersebut berisi data teknis, perkembangan konstruksi, serta rincian pembiayaan yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan ketergantungan Vietnam terhadap pembiayaan dan teknologi dari Tiongkok. Sumber tambahan berupa rekaman wawancara, konferensi pers, maupun konten digital dari kanal YouTube, podcast, dan media sosial resmi pemerintah Tiongkok dan Vietnam, seperti X dan Instagram juga digunakan untuk memperkuat data empiris penelitian ini.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari karya-karya akademik seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi lembaga internasional yang relevan³⁵. Data sekunder digunakan untuk memperluas konteks teoretis dan empiris mengenai hubungan Tiongkok dan Vietnam, implementasi BRI di Asia Tenggara, serta persepsi publik terhadap proyek Cat Linh–Ha Dong. Literatur dari penulis seperti Le Hong Hiep, Jonathan E. Hillman, dan Sara Lengauer memberikan kerangka analitis mengenai strategi geopolitik dan motif kebijakan luar negeri Tiongkok. Dengan mengombinasikan data akademik dan kebijakan, penelitian ini menempatkan proyek Cat Linh–Ha Dong sebagai studi kasus yang merefleksikan motif politik, ekonomi, dan ideologis Tiongkok.

³⁵ Sulung and Muspawi.

Selain literatur akademik, penelitian ini juga menggunakan laporan lembaga internasional dan regional, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, serta ASEAN Studies Centre, yang banyak meneliti dampak ekonomi dan sosial dari proyek infrastruktur lintas negara. Laporan-laporan tersebut berfungsi sebagai bahan pembandingan yang netral terhadap klaim resmi dari pemerintah Tiongkok. Dengan membandingkan kedua sumber tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana proyek Cat Linh–Ha Dong benar-benar berkontribusi pada pembangunan Vietnam atau justru memperkuat ketergantungan terhadap Tiongkok.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menelaah laporan media internasional dan lokal seperti *The Diplomat*, *South China Morning Post*, *Reuters*, *BBC News*, serta media nasional Vietnam seperti *VNExpress* dan *Nhan Dan*. Media massa memiliki peran penting dalam menunjukkan persepsi publik dan elite politik terhadap proyek ini, termasuk dinamika opini yang muncul terkait efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari proyek Cat Linh–Ha Dong. Analisis terhadap pemberitaan ini membantu peneliti memahami bagaimana proyek BRI Tiongkok dipersepsikan oleh masyarakat Vietnam, baik sebagai peluang ekonomi maupun ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Dengan memadukan data primer berupa dokumen resmi, laporan proyek, dan pernyataan pejabat dengan data sekunder berupa jurnal akademik, laporan lembaga internasional, dan media massa, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menghindari bias dan memastikan konsistensi antara fakta empiris dan interpretasi teoritis.

Pendekatan ini sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam terhadap makna dan konteks sosial-politik di balik fenomena yang dikaji. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bidang studi hubungan internasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap data non numerik yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, pola, dan hubungan yang muncul dalam fenomena sosial, bukan sekadar menjelaskan hubungan sebab-akibat yang bersifat kuantitatif³⁶. Analisis kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus untuk menafsirkan motif di balik kebijakan luar negeri Tiongkok melalui bantuan pembangunan jalur trem Cat Linh-Ha Dong di Vietnam, sebagaimana diuraikan dalam teori *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* oleh Sara Lengauer.

Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, proses analisis data kualitatif dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: mengelola data, membaca dan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi tema, menafsirkan data, serta menyajikan data³⁷. Kelima tahapan tersebut dilakukan

³⁶ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

³⁷ Creswell.

secara berurutan, berulang, dan saling berkaitan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan valid.

1. Mengelola Data

Teknik ini dilakukan dengan menyusun seluruh data yang telah diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori, seperti dokumen kebijakan resmi, laporan proyek, artikel jurnal, dan berita media. Setiap data kemudian diarsipkan dalam format digital untuk memudahkan proses penelusuran dan pengolahan lebih lanjut. Proses ini penting untuk memastikan konsistensi dan keterlacakan sumber data yang akan dianalisis.

2. Membaca dan Mengumpulkan Data

Teknik ini dilakukan dengan membaca secara menyeluruh semua data yang telah terkumpul untuk memperoleh pemahaman awal mengenai konteks penelitian. Peneliti mencatat ide-ide penting, pola temuan awal, dan pernyataan kunci yang relevan dengan motif ekonomi, politik, serta ideologi Tiongkok. Pada tahap ini, peneliti juga membuat memo reflektif sebagai catatan konseptual awal yang akan menjadi dasar bagi proses kategorisasi dan pengkodean data selanjutnya.

3. Mendeskripsikan dan Merumuskan Data Menjadi Tema

Teknik ini dilakukan dengan melakukan proses *coding* atau pengkodean terhadap data. Setiap potongan informasi yang relevan diberi label sesuai dengan

kategori tertentu yang mewakili tema-tema penelitian, seperti “kepentingan ekonomi”, “diplomasi politik”, atau “solidaritas ideologis.” Proses pengkodean ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola berulang dan keterkaitan antarfenomena yang muncul dalam data. Tema-tema tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kerangka analisis yang lebih terarah dan sistematis.

4. Menafsirkan Data

Teknik ini dilakukan dengan menghubungkan data yang telah dikategorikan dengan kerangka teori Sara Lengauer. Peneliti menafsirkan setiap temuan berdasarkan tiga motif utama yaitu, ekonomi, politik, dan ideologi untuk menjelaskan bagaimana Tiongkok memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Proses interpretasi ini bersifat analitis dan reflektif, di mana peneliti berupaya menemukan makna konseptual dari data empiris yang telah dikumpulkan.

5. Menyajikan Data

Teknik ini merupakan proses akhir dari analisis di mana hasil temuan disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang koheren. Peneliti memaparkan temuan-temuan utama berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, disertai dengan kutipan data, tabel, atau visualisasi pendukung jika diperlukan. Penyajian hasil dilakukan dengan mengedepankan kejelasan argumen dan keterkaitan logis antarbagian, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara data empiris, teori, dan interpretasi yang dilakukan peneliti.

Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berulang sesuai dengan lima tahapan yang dikemukakan oleh Creswell. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai motif Tiongkok dalam proyek pembangunan jalur trem Cat Linh Ha-Dong di Vietnam, serta memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian melalui penerapan prinsip triangulasi sumber dan analisis tematik yang ketat.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka berdasarkan tulisan ilmiah dan penelitian yang telah ada, kerangka konsep sebagai alat analisis, serta metode penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, batas penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN VIETNAM DAN TIONGKOK

Bab ini akan berisi uraian mengenai sejarah dan dinamika hubungan bilateral antara Tiongkok dan Vietnam dari masa perang dingin hingga periode modern.

BAB III BELT AND ROAD INITIATIVE DI VIETNAM

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep bantuan luar negeri Tiongkok, kerangka kebijakan BRI sebagai instrumen kebijakan

luar negeri, serta bentuk implementasinya di berbagai negara. Selanjutnya akan menjelaskan bentuk implementasinya di Vietnam.

BAB IV MOTIF TIONGKOK DALAM BANTUAN LUAR NEGERI PADA PROYEK TREM CAT LINH HA DONG DI VIETNAM

Bab ini akan berfokus pada analisis motif ekonomi, politik, dan ideologis Tiongkok dalam proyek trem Cat Linh-Ha Dong di bawah kerangka BRI. Analisis ini akan menggunakan teori *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* oleh Sara Lengauer.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti.

